BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh fasilitator untuk membangun masyarakat yang mandiri dan inovatif. Pembangunan masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk konsep kegiatan dari pemberdaya. Pemberdaya harus melaksanakan program dengan semaksimal mungkin. Jika program yang dibuat dan direncanakan semakin baik dan teratur maka hasilnya pun akan baik pula. Pelaksanaan ini tidak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih maju.

Perubahan itu sangat ditentukan oleh keduanya dalam bekerja sama, yaitu antara fasilitator dan masyarakat. Fasilitator yang memberikan arahan sekaligus contoh praktik di lapangan, yakni harus diikuti oleh masyarakat sebagai bentuk ikut serta dalam pembangunan. Kegiatan dari program yang dibuat fasilitator akan berjalan jika tidak ada sebagian orang yang saling mengandalkan satu sama lain. Karena keduanya dijadikan alat pembangunan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Sedangkan menurut Chamber, pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dalam membangun paradigma baru yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Selanjutnya Chamber mengatakan bahwa pada pemberdayaan ini tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif ekonomi lokal.[1]

Sejak dahulu pemberdayaan telah berkembang dari berbagai literatur dan pemikiran masyarakat, tetapi melihat kenyataan di lapangan bentuk kegiatannya

---

[1] Janianton Damanik dkk, *Membangun Pariwisata dari Bawah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 90.

belum semua terealisasi. Meskipun begitu, pemberdayaan dan pembangunan adalah dua hal yang masih banyak dibicarakan oleh masyarakat karena keduanya bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa ke depannya. Apalagi berkaitan dengan kemampuan masyarakat haruslah dibantu dengan pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini diperlukan fasilitas berupa dana, pikiran, tenaga untuk menunjang keberhasilan sebuah program.

Melihat kenyataan yang ada pada zaman sekarang, kegiatan pemberdayaan ini semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia dalam menganggarkan dana untuk kemajuan masyarakat khususnya di desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi masalah pengangguran penduduk di negaranya, yaitu Indonesia.[2]

Indonesia adalah negara berkembang yang sebagian penduduknya masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Kemiskinan tersebut bisa dikurangi dengan adanya tambahan lowongan pekerjaan. Pekerjaan ini bisa dilakukan dengan adanya pelayanan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial tersebut bertujuan untuk membantu dan melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat agar pola pikir dan usahanya menjadi terbuka dan maju. Selain itu, membantu mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan perwujudan prinsip-prinsip *good governance*.

Kegiatan pola pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengubah paradigma, menggugah kesadaran masyarakat, menumbuhkembangkan nilai-nilai partisipatif, kerja sama, swadaya dan kemandirian yang memungkinkan dapat dilakukan secara optimal dengan pola pendampingan melalui pendekatan kultural, pemberian motivasi, transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta fasilitasi kelembagaan organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan sama untuk meningkatkan derajat dan tarap kehidupan masyarakat ke arah yang

---

[2] Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2011), h. 88.

lebih sejahtera. Pola pendampingan ini saya temukan pada program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) di Kecamatan Cikeusal.

Program KSPP yang saya teliti adalah di Kampung Cimaung, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. KSPP adalah sebuah program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cikeusal yang di dalamnya meminjamkan uang kepada KSPP sebagai bentuk modal usahanya. UPK ini merupakan pengelola keuangan skala mikro dan melaksanakan berbagai macam kegiatan serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian untuk kesinambungan program. Selain itu, dibentuknya UPK berfungsi untuk menyalurkan, mengadministrasikan dan mengelola dana bantuan dari program pemerintah untuk masyarakat belum mandiri. Salah satu kecamatan yang tergolong masyarakat belum mandiri adalah Cikeusal.

Tujuan pemberian kredit/pinjaman kepada masyarakat adalah untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh kelompok atau anggota baik untuk peningkatan usaha atau produksi sebagai kredit modal kerja maupun investasi. Hasil dari pinjaman ini diharapkan dapat meningkatan perdagangan barang dan jasa serta penghasilan dari usaha yang dijalankan KSPP.

Selanjutnya, perguliran dana diberikan kepada kelompok yang pernah mendapat dana simpan pinjam dengan tingkat pengembalian 100% serta tidak termasuk ke dalam kelompok yang mempunyai tunggakan. Proses perguliran dana simpan pinjam dilakukan pertahun dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Kemudian dari SHU tersebut digulirkan dalam bentuk kambing bergulir, dan kegiatan sosial lainnya. Misalnya di tahun 2019-2020 diadakan kegiatan sunat masal di Kecamatan Cikeusal. Mekanisme dan ketentuan perguliran dana KSPP tersebut diatur dalam standar operasional perguliran yang disepakati dalam forum musyawarah kecamatan.

Perkembangan kegiatan UPK Cikeusal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan baik dari jumlah pinjaman, maupun jumlah anggota yang terus bertambah. Misalnya data KSPP tahun 2019 sudah mencapai 400 kelompok dan

beranggotakan 4000 lebih dari 17 desa di Kecamatan Cikeusal. Setiap kelompok memiliki batas minimal dan maksimal banyaknya anggota dan usia. Untuk minimal 1 kelompok terdiri atas 5 orang dan usianya setelah menikah. Sedangkan untuk maksimal anggota terdiri atas 20 orang dan batas maksimal usia yaitu 59 tahun.

Kemudian dari data yang didapat di tahun 2019, bahwa ada 5 kelompok desa mandiri yang sudah memiliki anggota, dana sendiri dan ketua kelompoknya yang mengatur dan menyetor dana anggotanya ke pihak UPK Cikeusal. Jika dari pihak anggota meminjam dana kepada ketua kelompok masih kurang, maka akan ditambahkan lagi dana tersebut dari pihak UPK. Ketua kelompok pun sama memiliki ilmu *manage* dalam mengelola dana keuangan.

Adapun 5 kelompok desa tersebut adalah Sukaraja, Dahu, Cilayang, Bantar Panjang dan Cikeusal. Ketua kelompok yang rajin dan tepat waktu menyetor dana KSPP setiap sebelum tanggal 10 maka akan mendapatkan hadiah berupa jalan-jalan, perabotan rumah tangga dan masih banyak lagi. Pihak UPK Cikeusal meminta dana sebagai bunga dari setiap anggota, yaitu 18% setiap tahunnya, dan bisa diangsur setiap setoran perbulan. Dana bunga tersebut digunakan sebagai tambahan untuk kegiatan sosial. Untuk itu dari data yang didapat, saya hanya mengambil 1 kampung, 1 desa sebagai *sample* untuk meminta informasi dari narasumber pengguna dana KSPP.

Oleh karena itu, saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan UPK Cikeusal dalam memberdayakan masyarakat melalui sistem kredit/KSPP di Kampung Cimaung. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya KSPP untuk kemandirian hidup ekonominya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya tertarik menulis skripsi dengan judul "**PROGRAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (KSPP) UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) CIKEUSAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" (Studi di**

Kampung Cimaung, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Lembaga UPK Cikeusal dalam menjalankan program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP)?
2. Bagaimana peran lembaga program KSPP UPK Cikeusal dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KSPP?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menjelaskan penerapan kebijakan Lembaga UPK Cikeusal dalam menjalankan program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP).
2. Menjelaskan peran lembaga program KSPP UPK Cikeusal dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KSPP.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap KSPP yang dilakukan Lembaga UPK Cikeusal dalam memberdayakan masyarakat Cikeusal, khususnya Kampung Cimaung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan dan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya. Selain itu, bisa memberikan masukan kepada lembaga KSPP UPK Cikeusal selaku pemberi pelayanan sosial di Kampung Cimaung untuk menjadi lebih baik dan maju.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan UIN SMH Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan saya dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu ini juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah berupa skripsi dan artikel di jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan:

Pertama, skripsi Putri Astini (2011), yang berjudul "*Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kegiatan Home Industry di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta"* di

Yogyakarta, UIN Sunan Kali Jaga. Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut adalah bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh perempuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah cukup maksimal dalam menjalankan kinerja usahanya. Pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan membuat produk, latihan dan penyuluhan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian perempuan diadakan juga arisan, simpan pinjam, tabungan, dan jimpitan beras. Partisipasi ibu-ibu yang mengikuti kegiatan PKK cukup besar namun masih bersifat pasif dan dalam pelaksanaannya tidak semua program PKK dapat dilaksanakan. Adapun manfaat dari pemberdayaan ini adalah para perempuan bisa membantu keluarganya untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena usaha *home industry* yang dijalankan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis Putri Astini adalah lebih kepada kegiatan *home industry* dan lokasi penelitian. Sedangkan yang saya teliti lebih kepada penghasilan KSPP dan kegiatan tambahan sosial KSPP UPK Cikeusalnya, yaitu di antaranya; pemberian dana sosial untuk masyarakat kurang mampu, kambing bergulir, sunat masal dan lain sebagainya.

Kedua, artikel di jurnal yang ditulis Siti Hasanah (2013), yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*" di Politeknik Negeri Semarang. Kesimpulan yang dapatkan dari artikel tersebut adalah bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan, dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Seperti: Bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam *Millenium Development Goals* (MDG's), yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Potensi organisasi perempuan ini menerapkan sistem yang bebas bunga karena bunga (*interest*) dilarang alqur'an.

Solusi yang ditawarkan menerapkan: *Pertama*; akad jual beli yaitu dengan akad murabahah, salam dan istishna', *kedua*, akad *partnership* yaitu berupa akad mudharabah, musyarakah dan muzara'ah dan *ketiga* akad ijarah atau sewa menyewa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasanah yaitu berdasarkan tempat penelitian dan menerapkan sistem nilai-nilai keadilan/simpan pinjam syariah. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu bahwa Lembaga UPK Cikeusal mampu memberdayakan 17 desa di masing-masing perwakilan anggotanya; salah satunya Kampung Cimaung, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal yang sekarang menjadi kelompok mandiri yang beranggotakan lebih dari 30 anggota. Mereka bisa mengurangi jumlah pengangguran di kampungnya karena tidak bekerja. di samping itu pula UPK Cikeusal sudah independen dari pemerintah pusat dan berada di bawah pembinaan DPMD, Kabupaten Serang.

Ketiga, skripsi Anifatus Solihah (2016), *yang berjudul "Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam"* di IAIN Purwokerto. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui *Home Industry* Bulu Mata di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam.

Sedangkan perbedaan isi skripsi yang ditulis Anifatus Solihah adalah lebih ke arah pendapatan keluarga yang menerapkan sistem Ekonomi Islam dan lokasi penelitian. Sedangkan saya lebih kepada penghasilan KSPP Kampung Cimaung dalam memandirikan keluarganya. Mereka bisa berjualan melalui warung kecil, dan lain sebagainya.

F. Kajian Teori

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sendiri menitikberatkan pada keadaan seseorang yang rentan dan lemah sehingga mampu untuk memberikan kekuatan dan kemampuan dalam *pertama*, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. *Kedua*, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan *ketiga* berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.[3]

Melakukan pemberdayaan adalah satu hal kegiatan yang memacu masyarakat lemah untuk tetap semangat dalam mengubah kehidupannya untuk menjadi mandiri. Mandiri di sini tidak hanya terbantu akan keuangan tetapi masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dari adanya pemberdayaan ini. Kegiatan pemberdayaan mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat Kampung Cimaung.

2. Masyarakat

Menurut Hasan Shadily, masyarakat adalah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa golongan yang di dalamnya saling memengaruhi satu sama lain. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa individu yang berbeda; baik dari fisik, keperibadian dan lain-lain.

Ada beberapa syarat dalam memenuhi kehidupan bersosial menurut Abu Ahmadi di antaranya; *pertama*, adanya sekumpulan manusia. *Kedua*, telah menetap lama di suatu daerah tempat tinggalnya, dan *ketiga*, yaitu adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

---

[3] Sarintan Efratani Darmanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 1-3.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.[4]

Menurut Hasan Shadily dalam Sofwani, pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat.[5] Sedangkan masyarakat adalah golongan kelompok kecil yang terdiri dari beberapa manusia, karena sendirinya bertalian secara golongan dan memengaruhi satu sama lain.[6]

Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang. Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya. Ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil sebagai implikasinya untuk meningkatkan akses, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukanlah pemberdayaan.[7]

Permasalahan ini bisa dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Sama halnya yang dilakukan para pengurus Lembaga UPK Cikeusal dalam memberdayakan masyarakat

---

[4] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: KENCANA, 2013), cetakan pertama, h. 24.

[5] Mutria Farhaeni, "*Komodifikasi Ragam Buah Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali*", dalam ANIMAGE: *Jurnal Studi Kultural*, Vol.1, No.1 (Oktober-November 2015), h. 2.

[6] Soemaryatmi, *"*Tari Slawatan Angguk Rame Ngargantantra: Kajian Sosiologis*",* dalam *HARMONIA*: *Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. VIII No. 1 (Januari-April 2007), h. 3.

[7] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), cetakan pertama, h.3.

Cimaung agar mandiri dalam hal ekonomi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi misalnya, penunggakan dan lainnya tersebut akan secepatnya dilakukan penanggulangan untuk perbaikan dan kelancaran KSPP.

Selanjutnya, menurut Sunyoto Usman, fungsi dan tujuan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut unsur struktural (kebijakan), dan kultural.[8]

Kemudian, salah satu tokoh Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki 22 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses tidaknya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dianggap konsisten dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya: Pembangunan menyeluruh, melawan kesenjangan strukural, Hak Asasi Manusia (HAM), berkelanjutan, pemberdayaan, personal dan politik, kepemilikan masyarakat, kemandirian, kebebasan dari negara, tujuan langsung dan visi yang besar, pembangunan organik, laju pembangunan, kepakaran eksternal, pembentukan masyarakat,

---

[8] Wayan Edi Arsawan, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Community Development*", dalam *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 3 (November 2016), h. 241.

proses dan hasil, integritas proses, tanpa kekerasan, *inclusiveness* (keterbukaan), konsensus, kooperatif, partisipasi dan menentukan kebutuhan.[9]

Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat mencakup 3 bagian, yaitu *pertama, the walfare approach. The walfare approach* merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu. *Kedua, the development approach. The development approach* merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Dan *ketiga, the empowerment approach. The empowerment approach* merupakan pemberdayaan masyarakat dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.[10]

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah; *pertama*, dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa "hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah

---

[9] Jim Ife merupakan seorang profesor di bidang pekerja sosial, ia lahir pada tahun 1946. Ia merupakan lulusan dari Ohd University of Tasmania dan MSG McGill University (Canada). Ia aktif dalam organisasi *Social Work and Community Walfare* (SSAP). Ia memiliki banyak karya, salah satunya ialah buku yang berjudul '*Community Development in an Uncertain World'*: *Vision, Analysis and Practice.*

[10] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*,..., h. 120.

mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat". *Kedua*, mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa "kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah". *Ketiga*, dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna, membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik". *Dan keempat***,** dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut;

- Visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat.
- Misi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. [11]

[11] Munawar Noor, "*Pemberdayaan Masyarakat*", ..., h. 89-90.

4. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP)

Program KSPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.[12]

a. Pinjaman

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas Suyatno istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *(credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan berupa barang, uang, atau jasa.[13]

b. Jenis dan Penggolongan Kredit

Menurut Kasmir jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

---

[12] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM Mandiri Perdesaan, *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, h. 58.

[13] Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), h. 3.

a) Kredit investasi. Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi

b) Kredit modal kerja. Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misal untuk membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a) Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah. Kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

a) Kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a) Kredit pertanian. Kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Kredit peternakan. Dalam hal ini, untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.

c) Kredit industri. Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

d) Kredit pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.

e) Kredit pendidikan. Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

f) Kredit profesi. Kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g) Kredit perumahan. Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h) Dan sektor-sektor lain[14]

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas KSPP Cimaung karena mereka bisa terbantu dengan adanya modal kredit yang

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Eds. Revisi; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

diberikan oleh program KSPP UPK Cikeusal. UPK berhasil memberikan pinjaman yang diminta masyarakat dan disesuaikan dengan penghasilan dari usaha masyarakat, dalam artian bisa terbayar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis.[15] Dalam suatu penelitian metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.[16] Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Cimaung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang program KSPP UPK Cikeusal terhadap pemberdayaan usaha kecil peminjam.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

   Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kampung Cimaung. Di sini penulis melakukan penelitian terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KSPP UPK Cikeusal dalam memberdayakan masyarakat Kampung Cimaung untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Cikeusal. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 November 2019-18 Januari 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[15] Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 5.

[16] Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tes*is, (Yogyakarta: Suaka Media, 2013), cetakan pertama, h.8.

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Supardi, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[18] Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian, yaitu di Kampung Cimaung.

b. Wawancara

Definisi wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono, merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[19] Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang mendalam (*in-depth interview*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.[20]

Kegiatan wawancara yang dilakukan pada skripsi ini adalah penulis datang dan mewawancarai beberapa informan di Lembaga UPK Cikeusal, Kampung Cimaung dan perwakilan pihak DPMD.

---

[17] Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h.72. 47.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h. 310.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*,....., h.316.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h.318.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara adalah 2 pengurus UPK Cikeusal, 8 informan Kampung Cimaung dan 1 staff DPMD.

Penulis mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Penulis melakukan wawancara dengan merekam dan mencatat isi pembicaraan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis. Selain itu, dari 11 informan tersebut merupakan informan penting untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, mulai dari data Lembaga UPK Cikeusal, informan penerima pinjaman, dan Lembaga DPMD Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian.[21] Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa arsip, struktur pengurus UPK Cikeusal dan foto pemberdayaan usaha mikro KSPP masyarakat Kampung Cimaung.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan lawan kata sekunder, yang berarti utama, asli atau langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data yang

[21] Albi Aggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), cetakan pertama, h. 255.

dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.[22]

Data penelitian tersebut berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti, buku-buku, internet, dan sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[23] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.[24] Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).[25]

---

[22] Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada *Young Enterpreneur Academy* Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol VIII, No. 2, (Oktober 2016), h. 23.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan* Kombinasi,....., h.332.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*,....., h.337.

[25] Tantia Wulan Kurnia dkk, "Efektivitas Efektivitas Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (Kk Miskin) Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bogor", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (April, 2019), h. 5.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data objek hasil lapangan, yaitu tentang pemberdayaan KSPP masyarakat Kampung Cimaung. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat menjadi lebih baik dalam peningkatan ekonominya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, gambar, dan sejenisnya. Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan program KSPP UPK Cikeusal dalam memberdayakan dan, meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Cimaung.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[26] Penulis memberikan kesimpulan terhadap data yang sudah ada dan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh berasal dari kegiatan pemberdayaan KSPP, dengan melakukan pengamatan langsung. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis agar masalah yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, masalah yang telah dianalisis lalu dijabarkan dan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

---

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*,....., h. 343.

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan atau membahas sejarah Lembaga UPK Cikeusal, visi dan misi, tujuan, sasaran kelompok peminjam, program-program UPK Cikeusal, fasilitas program, dan sumber fasilitas.

BAB III membahas fokus penelitian, yaitu tentang pemberdayaan yang dilakukan Lembaga UPK Cikeusal terhadap KSPP Kampung Cimaung; mulai dari kondisi pendidikan, ekonomi dan sosialnya.

BAB IV menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis pemberdayaan masyarakat Kampung Cimaung melalui program KSPP UPK Cikeusal yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian. Adapun sub-bab yang akan dijelaskan meliputi program, penerapan kebijakan, peran, faktor pendukung dan penghambat Lembaga UPK Cikeusal dalam memberdayakan KSPP Kampung Cimaung.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.